

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Cholisin. 2007. Dasar –Dasar Ilmu Politik. UNY Press: Yogyakarta.
- Encik Muhammad Fauzan. 2017. Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press: Malang.
- Farchan Bulkin. 1991. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. LP3ES: Jakarta
- Firman Freaddy Busroh. 2016. Teknik Perundang-Undangan Suatu Pengantar. Cintya Press: Jakarta.
- Isra, S. dan K. F. 2019. Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika: Jakarta.
- John, Rawls dan Uzair, Fauzan. 2011. A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Katz dan Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Nusa Media: Bandung.
- Khairul Fahmi 2016. Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi. Raja Grafindo Persana: Jakarta.
- Kuswanto. 2016. Konstitusional Penyederhanaan Partai Politik. Setara Press: Malang.
- M. Tahir Azhari. 2005. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Prenada Media: Jakarta.

Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara: Jakarta.

Muhadam Labolo. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ni'matul Huda. 2007. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. UII Press: Yogyakarta.

Ni'matul Huda. 2015. Hukum Tata Negara Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta.

Pratama. H. M. U. H. S. 2020. Manajemen Pemilu: Pendaftaran Partai Politik.

Rizkiyansyah, F. K. 2017. Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi Catatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014. Epicentrum Mahadaya Komunika: Jakarta.

Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo: Jakarta.

Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Ichtiar: Jakarta.

Uu Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia. Fokusmedia: Jakarta.

Jurnal/Majalah Ilmiah

Abdul Wahid. 2016. Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011). Jurnal Konstitusi Nomor. 1

Aldho Syfriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari. 2019. Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal Wacana Politik Nomor 1.

- AsancayaFaisaNazhiffah dan Sunny UmmulFirdau. 2022. AnalisisKedudukanSistemPresidensialDalamPembentukanUndang-UndangNomor 7 Tahun 2017 TentangPemilihanUmum.SovereigntyNomor 2.
- BaharElfudllatsani, Isharyanto dan Agus Iwanto. 2019. Kajian MengenaiKebebasanBerkumpul dan BerserikatPasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 MelaluiOrganisasiKemasyarakatanKaitannyaDenganTeoriKedaulatan Rakyat dan Hak AsasiManusia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Nomor1.
- BudionoKusumohamidjojo. 2016. Ketertiban Yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi Yang Historis Dari Hukum. Veritas et IustitiaNomor 1.
- Dina Lorenza.2021. Pelaksanaantugas dan wewenang KPU Provinsi Jambi dalammemverifikasipartaipolitikpesertapemiluProvinsi Jambi berdasarkanUndang-UndangNomor 7 tahun 2017. Limbago: Journal of Constitutional LawNomor 2.
- Felicia Patricia dan ChindyYapin.2019. PenguatanMekanismePenyelenggaraanPemilihanUmumMelaluiRekonstruksiKesadaranPenyelenggaraanPemilihanUmum.Binamulia HukumNomor. 1.
- Firdaus. S. U., Muhamad Alief Hidayat. Muhammad HerzegovinLaxamana Firdaus. 2021. UrgensiPenyelenggaraan Pusat StudiDemokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkungan Universitas. JurnalIlmiah Dunia Hukum.Nomor1.
- Gandha Widyo Prabowo. 2017. IntegritasPemilu: Proses VerifikasiPesertaPemilu di KPUD Pada PemiluLegislatif 2014. JurnalPolitik Indonesia Nomor 1
- I GedeYusa dan BagusHermanto. 2017. GagasanRancanganUndang-undang Lembaga Kepresidenan, CerminanPenegasan dan PenguatanSistemPresidensiil Indonesia. JurnalLegislasi Indonesia Nomor 3.
- Indra Madan Putra, Ria Ariany, dan Syahrizal. 2019. Tata Kelola VerifikasiPartaiPolitikPesertaPemilihanUmumTahun 2019 di KomisiPemilihanUmum Kota Padang. JISPO JurnalIlmuSosial dan IlmuPolitikNomor. 1

- Manao, M. L. A. P. 2022. Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat. Jurnal TEDC Nomor 1.
- Masyarofah. 2013. Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi). Jurnal Cita Hukum Nomor 2.
- Muhammad Febry Ramadhan. 2018. Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia. Lex Renaissance Nomor 1.
- Muslih, Andre Pebrian Perdana, dan Kamal Fahmi Kurnia. 2021. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif. Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1
- Putra, I. M. R. A. S. 2019. Tata kelola verifikasi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 di komisipemilihan umum kotapadang. JISPO Journal. Nomor 1.
- Putu Eva Ditayani Antari. 2014. Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Magister Hukum Udayana Nomor 3.
- Sukanto Satoto. 2004. Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara. Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.
- Zainal Arifin Mochtar. 2019. Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum Nomor 2.

Surat Kabar

- Aristoteles, Nicomachean Ethis, Translated by W. D. Ross. <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>. Diakses Pada Tanggal 29 September 2022.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Di akses pada 5 Juni 2023.

Kesbangpol. 2023. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Diakses pada 11 Maret 2023.

Republik Indonesia. Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>. Diakses Pada 11 Maret 2023.

The Constitutional Court and of the Republic of Indonesia. 2007. The Sole Interpreter Of The Constitution. <https://en.mkri.id/news/details/2007-07-16/THE+SOLE+INTERPRETER+OF+THE+CONSTITUTION>. Diakses Pada 11 Maret 2023.

PeraturanPerundang-undangan

PeraturanBawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

